

Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pupuk untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Afridinata Afridinata^{1*}, Seno Andri², Hasim As'ari³, Zulkarnaini Zulkarnaini⁴

¹⁻⁴ Universitas Riau, Indonesia

Email : afridinata8805@grad.unri.ac.id^{1*}, seno.andri@lecturer.unri.ac.id², hasimasari@lecturer.unri.ac.id³, zulkarnainifisip@lecturer.unri.ac.id⁴

Abstract. This study aims to evaluate the fertilizer assistance policy for oil palm farmers in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, focusing on its effectiveness, targeting accuracy, and impact on production improvement. The research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that although the program is intended to enhance oil palm productivity, its implementation faces several challenges such as delayed fertilizer distribution, inaccurate targeting of beneficiaries, and lack of technical assistance. Most farmers reported that fertilizers often arrive after the ideal planting season and are not distributed evenly. Additionally, the absence of accurate farmer data systems has led to unfair distribution and vulnerability to misuse. This study recommends improvements in the distribution mechanism, digital-based data updating for recipients, and the strengthening of farmer institutions and continuous extension services to ensure the program is more effective and impactful. A comprehensive policy evaluation is expected to ensure that fertilizer assistance truly contributes to increasing yields and promoting the sustainable welfare of oil palm farmers.

Keywords: fertilizer assistance, oil palm farmers, Pangkalan Kuras District, policy evaluation, production.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan pupuk kepada petani kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dengan fokus pada efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap peningkatan produksi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani sawit, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi pupuk, ketidaktepatan sasaran penerima, serta kurangnya pendampingan teknis. Sebagian besar petani menyatakan bahwa bantuan pupuk tidak datang sesuai musim tanam dan distribusinya tidak merata. Di sisi lain, belum adanya sistem pendataan petani yang akurat menyebabkan bantuan cenderung tidak adil dan rawan penyimpangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam mekanisme distribusi, pemutakhiran data penerima berbasis digital, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan pendampingan berkelanjutan agar program berjalan lebih efektif dan berdaya guna. Dengan evaluasi kebijakan yang menyeluruh, diharapkan pemberian bantuan pupuk benar-benar mampu mendukung peningkatan hasil panen serta kesejahteraan petani kelapa sawit secara berkelanjutan.

Kata kunci: bantuan pupuk, evaluasi kebijakan, Kecamatan Pangkalan Kuras, petani kelapa sawit, produksi.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pertanian tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas pertanian adalah ketersediaan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk yang berkualitas dan terjangkau. Sektor pertanian juga berperan

penting dalam penyediaan bahan baku bagi industri makanan, minuman, dan bioenergi, serta sebagai penyerap tenaga kerja yang besar, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penguatan sektor ini melalui kebijakan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi agenda penting bagi pemerintah.

Pupuk berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan serta memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, banyak petani di Indonesia, khususnya petani kecil, menghadapi kendala dalam mengakses pupuk berkualitas akibat keterbatasan finansial, distribusi yang tidak merata, serta harga pupuk yang fluktuatif. Tingginya harga pupuk, terutama pupuk non-subsidi, menjadi kendala bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas. Selain itu, ketergantungan terhadap pupuk kimia dalam jangka panjang juga menimbulkan permasalahan degradasi tanah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan pupuk. Menyadari berbagai tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program subsidi dan bantuan pupuk untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Selain tantangan finansial, aspek teknis dalam penggunaan pupuk juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pertanian. Banyak petani yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dosis dan metode aplikasi pupuk yang tepat, sehingga sering kali penggunaan pupuk menjadi kurang efisien. Kesalahan dalam penggunaan pupuk dapat menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Untuk mengatasi kendala akses pupuk bagi petani kecil, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan subsidi dan bantuan pupuk, salah satunya melalui program pemberian pupuk gratis bagi kelompok tani. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pertanian bagi petani kecil. Selain itu, regulasi terkait distribusi pupuk juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menekankan pentingnya transparansi, ketepatan sasaran, dan efektivitas dalam distribusi pupuk kepada petani yang membutuhkan.

Program bantuan pupuk yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau dan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pertaniannya. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada mekanisme distribusi dan pengawasan di tingkat lapangan. Bantuan Pupuk ini merupakan

program andalan Bupati dan Wakil bupati sehingga dibuatlah dasar hukum untuk menjalankan program tersebut dalam bentuk Peraturan Bupati No. 40 tahun 2022 yang bertujuan utk meningkatkan Produksi bagi petani kelapa sawit. Dalam pemberian bantuan pupuk ini perlu di Evaluasi untuk keberlanjutan program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Kretria, mekanisme Penetapan penerimaan Bantuan, monitoring, dan pengawasan serta Pembentukan tim petugas dalam kegiatan bantuan pupuk petani kelapa sawit. Dalam yang terpenting adalah dampak terhadap petani sawit setelah menerima bantuan pupuk tersebut apakah sudah sesuai dengan peruntukannya sementara menggarap APBD yang besar dalam menjalankan program ini.

Kebijakan pemberian bantuan pupuk bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan tertuang dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pupuk untuk Meningkatkan Produksi bagi Petani Kelapa Sawit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, mengurangi beban biaya produksi petani, serta memperkuat daya saing komoditas kelapa sawit di pasar nasional maupun internasional. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, jumlah kelompok tani penerima pupuk gratis meningkat dari 150 kelompok pada tahun 2022 menjadi 200 kelompok pada tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai 250 kelompok pada tahun 2024. Jumlah total pupuk yang disalurkan mencapai 5.000 ton per tahun.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah aspek administratif dalam proses verifikasi data penerima manfaat. Banyak petani yang belum terdaftar dalam kelompok tani resmi sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pupuk. Selain itu, distribusi pupuk masih menghadapi kendala terkait efektivitas dan ketepatan waktu, yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas. Di beberapa wilayah, kualitas pupuk yang diterima juga menjadi perhatian, mengingat adanya kasus pupuk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Menurut Nusantara Tahun 2022, Pemkab Pelalawan akan salurkan bantuan pupuk gratis hal ini disampaikan oleh bupati Pelalawan H. Zukri saat melakukan silaturahmi bersama masyarakat pada saat kunjungan kerja Selasa, (09/11). “Program pupuk gratis bertujuan sebagai motivasi bagi petani untuk melakukan perawatan, melihat hasil produksi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang mereka punya, karena kebiasaan kita kurang melakukan perawatan serta kurang memberi pupuk bagi kebun kita.” Jelas H. Zukri. (Nusantara, 2022)

Dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 Pada Bagian Kedua Maksud dan Tujuan, Pasal 2 Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum pelaksanaan dalam pemberian bantuan pupuk untuk meningkatkan produksi bagi petani kelapa

sawit di daerah. Sedangkan Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian bantuan pupuk untuk meningkatkan produksi bagi petani kelapa sawit di daerah. Untuk jenis dan besaran bantuan pupuk yang dialokasikan untuk paket bantuan pupuk bagi petani atau pekebun kelapa sawit, meliputi pupuk anorganik, pupuk organik, dan pembenah tanah. Besaran paket bantuan pupuk untuk setiap petani atau pekebun kelapa sawit penerima sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan luas lahan atau tanah kebun penerima dan anggaran yang tersedia. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian jenis dan besaran paket bantuan pupuk untuk setiap petani atau pekebun kelapa sawit penerima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati. Petani atau pekebun kelapa sawit dengan luas lahan 1 hektare atau lebih ditetapkan pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium (pupuk NPK) paling banyak 50 kilogram dan pupuk dolomit paling banyak 150 kilogram per keluarga dengan anggaran yang tersedia sedangkan petani atau pekebun kelapa sawit dengan luas lahan kurang 1 hektare ditetapkan pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium (pupuk NPK) paling banyak 50 kilogram dan pupuk dolomit paling banyak 50 kilogram per keluarga dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal luas lahan kurang dari 1 hektare ditetapkan luas minimumnya adalah 0,4 hektare.

Pada tahun 2024 uraian jenis dan besaran paket bantuan pupuk untuk meningkatkan produksi bagi petani kelapa sawit dikabupaten pelalawan berdasarkan luas lahan atau tanah kebun penerima dengan ketentuan yakni Petani/Pekebun Kelapa Sawit dengan luas lahan 1 (satu) hektare atau lebih ditetapkan Pupuk Nitrogen, Fosfat dan Kalium (Pupuk NPK) paling banyak 50 (lima puluh) kilogram dan Pupuk Dolomit paling banyak 100 (seratus) kilogram per Penerima sesuai dengan anggaran yang tersedia. Petani/Pekebun Kelapa Sawit dengan luas lahan kurang dari 1 (satu) hektare ditetapkan Pupuk Nitrogen, Fosfat dan Kalium (Pupuk NPK) paling banyak 50 (lima puluh) kilogram dan Pupuk Dolomit paling banyak 50 (lima puluh) kilogram per Penerima sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal luas lahan kurang dari 1 (satu) hektare ditetapkan luas minimumnya adalah 0,4 (nol koma empat) hektare.

Kecamatan Pangkalan Kuras, sebagai salah satu wilayah utama perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, memiliki luas lahan sawit pada tahun 2022 dan 2023 sekitar 20.000 hektare dengan tingkat produksi mencapai 1,2 juta ton per tahun. Namun, produktivitas lahan masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan pupuk, teknik budidaya yang belum optimal, serta kurangnya pendampingan teknis bagi petani. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak petani masih belum memahami secara optimal teknik penggunaan pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah dan jenis tanaman mereka. Evaluasi terhadap program ini menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya di masa mendatang. Studi

terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan pupuk sangat bergantung pada sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan distributor pupuk. Peningkatan transparansi dalam penyaluran, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi bagi petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki program ini.

Dampak dari kebijakan bantuan pupuk tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sarana produksi pertanian. Secara sosial, kebijakan ini dapat mendorong pemberdayaan kelompok tani, memperkuat solidaritas antar petani, serta menciptakan peluang usaha baru di sektor pertanian. Sementara itu, dari segi lingkungan, penggunaan pupuk yang sesuai dengan rekomendasi teknis dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan mengurangi dampak negatif akibat penggunaan pupuk yang berlebihan atau tidak sesuai standar.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap sebuah data yang dikumpulkan melalui asesmen. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dengan data yang telah diperoleh melalui pengukuran, baik menggunakan instrumen tes maupun non tes. Secara harfiah evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut diserap kedalam perbendaharaan Istilah bahasa Indonesia “evaluasi”.

Menurut Arikunto, Evaluasi secara etimologi, adalah penilaian, Sedangkan secara terminologi evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian evaluasi itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang sudah terlaksana dan hasil evaluasi menentukan suatu nilai dan kualitas. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985), evaluasi adalah proses pemberian informasi yang dapat digunakan sebagai gantinya untuk menentukan harga dan pelayanan (nilai dan manfaat) dari tujuan, desain, implementasi, dan efektivitas yang dicapai. Menjamin akuntabilitas dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, hakikat evaluasi adalah memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Brikerhoff (1986) menjelaskan evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.

Menurut Suryana (2004) suatu proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasari atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dapat dikatakan penafsiran, penilaian atau penakaran terhadap suatu kegiatan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nugroho (2004) evaluasi dapat dilaksanakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan. Kemudian menurut Effendi (2008) evaluasi mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, namun demikian, konsep evaluasi sendiri selalu terikat konsep kinerja, sehingga evaluasi kebijakan pada ketiga wilayah tersebut merupakan kegiatan pasca kegiatan.

Konsep evaluasi menurut Nugroho (2004) adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tugas pertanyaan pokok, yaitu bagaimana kinerja implementasi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu, dan bagaimana strategi peningkatan kinerja. Evaluasi terhadap formulasi kebijakan merupakan upaya melakukan penilaian pada saat membuat kebijakan itu sendiri dan biasanya dilakukan oleh bidang kajian politik. Sedangkan untuk bidang kajian administrasi lebih kepada pada proses implementasi dan hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Dunn (2003) bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan jelas atau diatasi.

Evaluasi Program

Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana (Diana, 2023). Secara khusus, jika seorang siswa ditanya oleh guru, apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah yang diikuti, maka arti program dalam kalimat tersebut adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua sehingga akan memberi jawaban bahwa program masa depan menunggu keputusan orang tuanya.

Ralph Tyler menegaskan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Cronbach dan stufflebeam mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksud untuk mengetahui seberapa tinggi tingkatan keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Fajri, 2023).

Musa mengemukakan bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas keadaan objek secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas (Musa, 2005). Menurut Saludung, evaluasi program adalah penelitian evaluasi terhadap pengelolaan, pengkoordinasian dan penyerasian program secara holistik dan integratif (Saludung, 2009).

Evaluasi program memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Keberhasilan tersebut meliputi efektivitas program, seperti waktu, kelancaran, dana, tenaga, dan kualitas hasil yang dicapai (Divayana, 2018). Tujuan umum evaluasi program adalah menyediakan solusi terhadap pertanyaan – pertanyaan penting. Sedangkan peran evaluasi program menekankan pada cara – cara menggunakan jawaban atau solusi yang diperoleh.

Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sudah lama sepanjang kehidupan manusia. Negara-negara maju dan negara industri sekarang ini, masalah sosial di rasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang teratur. Menurut Walter A. Friedlander dalam Salamah (2011) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah:

”Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan selain yang di atas baik dalam pelayanannya, penanganannya atau dalam intervensinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Melalui program dari pemerintah, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Fahrudin (2012) definisi kesejahteraan sosial adalah: “Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berintikan lembaga dan pelayanan untuk membantu individu, kelompok mencapai kebutuhan hidup. Dimana dalam hal ini berkaitan dengan petani, pertanian yang sangat memerlukan bimbingan dari kelompok maupun pemerintah melalui pekerja sosial yang tergabung dalam program UPPB karena bergerak di bidang yang memberikan dampingan bagi petani untuk meningkatkan keberhasilan petani.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, dalam hal ini adalah Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras adalah karena Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki luas areal terluas kedua namun memiliki hasil perkebunan pada urutan ketiga, relatif rendah dengan persentase 38% yang dirasa kurang sesuai

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Berikut adalah beberapa kelompok informan yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat Pangkalan Kuras, Pedamping Siaga Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Masyarakat.

Data primer diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari pihak Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Program Pemberian Bantuan Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Program pemberian bantuan pupuk kepada petani kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan program ini dapat terlihat dari meningkatnya hasil panen petani yang mendapatkan bantuan pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Seorang petani di Desa Sorek Satu mengungkapkan,

“.....Setelah ada bantuan pupuk, hasil panen kami naik sekitar 20 sampai 30 persen. Ini sangat membantu, apalagi harga pupuk saat ini mahal.....” (Wawancara Kelompok Tani)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa intervensi berupa subsidi pupuk mampu mengurangi beban biaya produksi dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Dari sisi perencanaan, pemerintah daerah dan dinas terkait melakukan pendataan kebutuhan petani sebelum program dilaksanakan. Menurut perwakilan Dinas Perkebunan,

“.....Kami melakukan pendataan berdasarkan kelompok tani aktif, luas lahan, dan histori produksi. Pendataan ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan.....” (Wawancara Dinas Perkebunan)

Hal ini menunjukkan adanya proses perencanaan yang berbasis kebutuhan, meskipun pada praktiknya beberapa petani mengaku tidak dilibatkan langsung dalam proses identifikasi.

Terkait distribusi, program bantuan pupuk berjalan melalui jalur kelompok tani yang sudah terdaftar. Namun, penyaluran belum sepenuhnya tepat waktu. Salah satu ketua kelompok tani menyampaikan,

“.....Pupuk datangnya kadang lewat dari waktu yang seharusnya. Tapi secara umum sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya.....” (Wawancara Kelompok Tani)

Hal ini menunjukkan perbaikan distribusi dari segi ketepatan waktu, meskipun belum maksimal. Dari sisi ketepatan sasaran, mayoritas petani penerima bantuan adalah petani kecil dengan luas lahan di bawah 2 hektar, yang memang menjadi prioritas program. Dampak langsung program terlihat dari peningkatan hasil panen dan pendapatan petani. Berdasarkan data lapangan, petani yang mengikuti program ini mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar rata-rata 25% dibandingkan sebelum menerima bantuan. Selain itu, program ini juga mendorong petani untuk lebih disiplin dalam pola pemupukan dan perawatan tanaman. Seorang petani menuturkan,

“.....Dulu kami tidak terlalu tahu soal pemupukan. Sekarang ada penyuluhan juga, jadi lebih paham cara merawat sawit.....” (Wawancara Kelompok Tani)

Dari segi penganggaran, program ini bersumber dari dana APBD dan didukung oleh skema bantuan pusat melalui Dinas Perkebunan. Pengelolaan logistik pupuk melibatkan kerja sama dengan distributor resmi, namun tantangan muncul pada rantai distribusi tingkat akhir.

“.....Kadang pupuk sudah sampai di tingkat kecamatan, tapi lambat dibagi karena tunggu administrasi atau transportasi dari kelompok tani.....” ujar seorang staf kecamatan.

Untuk memastikan program ini tidak hanya bersifat sesaat, beberapa upaya keberlanjutan telah dirancang, seperti integrasi program bantuan pupuk dengan pelatihan petani, pembentukan koperasi tani mandiri, dan monitoring hasil produksi secara berkala. Pihak Dinas menyatakan,

“.....Kami ingin program ini terus berjalan, bukan hanya bantuan, tapi juga pembinaan dan penguatan kapasitas petani.....” (Wawancara Dinas Perkebunan)

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program ini meliputi akurasi pendataan penerima, ketepatan waktu distribusi, dukungan penyuluhan teknis, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. Sebaliknya, hambatan utama yang dapat menghambat keberhasilan meliputi keterbatasan anggaran, logistik yang lambat, serta kurangnya keterlibatan langsung petani dalam perencanaan. Oleh karena itu, keberlanjutan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan lembaga pendukung lainnya.

Alternatif Perbaikan untuk Program Pemberian Bantuan Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberian bantuan pupuk kepada petani kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan produksi perkebunan rakyat. Beberapa permasalahan mendasar ditemukan di lapangan, antara lain terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan distribusi pupuk, serta kurangnya pendampingan teknis terhadap petani penerima. Dalam beberapa wawancara, petani mengeluhkan bahwa bantuan pupuk tidak selalu datang pada waktu yang sesuai dengan siklus pemupukan. Salah satu petani menyatakan,

“.....Pupuk datangnya sudah telat, kadang lewat musimnya. Jadi tidak maksimal hasilnya.....”(Wawancara Kelompok Tani)

Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi belum disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Selain itu, terdapat masalah dalam validasi data petani penerima. Banyak petani kecil yang merasa layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan pupuk, sementara kelompok tani besar atau petani dengan lahan luas justru menjadi prioritas. Seorang ketua kelompok tani menyebutkan,

“.....Kadang yang dapat itu bukan yang paling butuh, tapi yang dekat dengan aparat atau punya kedekatan.....” (Wawancara Kelompok Tani)

Ini mencerminkan masih lemahnya prinsip keadilan dan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan. Alternatif perbaikan yang dapat dilakukan mencakup beberapa aspek strategis. Pertama, pemerintah daerah dan dinas terkait perlu melakukan pemetaan dan verifikasi ulang data petani berbasis sistem digital agar penyaluran pupuk benar-benar menyentuh kelompok petani yang membutuhkan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis NIK dan lokasi lahan dapat membantu menyaring penerima dengan lebih akurat dan objektif. Kedua, diperlukan penjadwalan distribusi pupuk yang disesuaikan dengan kalender tanam lokal, sehingga efektivitas pemupukan dapat tercapai secara optimal. Ketiga, program bantuan pupuk harus disertai dengan pendampingan dan pelatihan teknis, seperti edukasi pemupukan berimbang, teknik perawatan tanaman, dan manajemen kebun secara berkelanjutan.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan peran serta kelembagaan petani, baik dalam bentuk koperasi maupun kelompok tani, untuk mendistribusikan pupuk secara gotong-royong dan transparan. Pemerintah juga dapat menjajaki skema subsidi pupuk bersyarat, yaitu bantuan pupuk diberikan kepada petani yang mengikuti pelatihan dan bersedia menerapkan praktik

pertanian berkelanjutan. Terakhir, penting adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak program pemberian pupuk terhadap produktivitas sawit, baik dari sisi kuantitas panen maupun kesejahteraan petani. Dengan perbaikan menyeluruh, program ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan, tetapi mampu mendorong transformasi produktivitas dan kemandirian petani sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program pemberian bantuan pupuk kepada petani kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani, terutama bagi mereka yang menerima pupuk secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan lahannya. Keberhasilan program ini ditunjang oleh adanya pendataan awal dari pemerintah mengenai kebutuhan petani, meskipun keterlibatan petani dalam proses perencanaan masih terbatas. Distribusi pupuk pada umumnya dilakukan melalui kelompok tani, namun masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu dan penyelesaian logistik, yang berpengaruh terhadap efektivitas program. Selain itu, keberadaan penyuluhan dan pendampingan teknis turut memberikan pemahaman baru kepada petani mengenai praktik pemupukan yang baik. Faktor utama yang mendukung keberhasilan program meliputi sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan dinas terkait. Sebaliknya, keterlambatan distribusi, kurangnya transparansi, dan belum optimalnya sistem pengawasan menjadi hambatan yang harus segera dibenahi.

Agar program bantuan pupuk ini dapat lebih efektif dan berkelanjutan, disarankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pembaruan data petani secara berkala dengan melibatkan langsung kelompok tani dan perangkat desa guna memastikan ketepatan sasaran. Distribusi pupuk sebaiknya disesuaikan dengan kalender tanam dan kebutuhan lokal agar bantuan memberikan hasil optimal. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem logistik dan penganggaran, serta mempercepat proses administrasi penyaluran pupuk. Selain itu, pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari program bantuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola kebun kelapa sawit secara efisien. Terakhir, penting untuk mengembangkan sistem evaluasi berbasis data dan umpan balik petani agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dale, Reidar. (2004). *Evaluating Development Programmes and Project*. Sage Publications India Pvt Ltd. India.
- Divayana, Dewa. (2018). *Evaluasi Program*. PT. RajaGrafindo Indonesia
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika. Aditama.
- Muhidin, Syarif. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sekolah. Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung*.

Jurnal

- Diana, A. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
- Fajri. (2023). *View of Pentingnya Evaluasi Program di Insitusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat*. Jurnal Uksw.edu
- Fathoni, A., & Haryono, T. (2020). *Ketepatan Sasaran Program Subsidi Pupuk di Indonesia: Studi Kasus Daerah Tertinggal*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 123-134.
- Prasetyo, H., Rahayu, T., & Nugroho, P. (2021). *Edukasi Petani dalam Optimalisasi Penggunaan Pupuk*. Journal of Agricultural Development, 20(1), 67-78.
- Saludung, Jokebet. (2009). *Peranan Evaluasi Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Jurusan*. Jurnal MEDTEK
- Setiawan, E., & Rahmawati, S. (2020). *Peran Koordinasi dalam Keberhasilan Program Subsidi Pupuk*. Journal of Rural Development, 18(4), 89-102.
- Sukardi, D. (2019). *Transparansi dalam Distribusi Subsidi Pupuk: Perspektif Petani dan Penyedia*. Agribusiness Research Journal, 12(3), 45-56.

Peraturan

- Peraturan Perundang – Undangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang *Pemberian Bantuan Pupuk untuk Meningkatkan Produksi bagi Petani Kelapa Sawit*.
- SK Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Nomor Kpts.500.8/DISBUNNAK-SP/2024/50.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.